

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Politik

1. Pengertian Politik

Asal mula politik dapat ditelusuri dari bahasa Yunani "Polistai," yang terdiri dari dua komponen, yaitu "Polis" yang mengacu pada sebuah entitas masyarakat yang mengatur dirinya sendiri (negara), dan "taia" yang berarti urusan.³ Politik selalu berfokus pada tujuan keseluruhan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi individu. Dalam konteks kepentingan publik, politik diartikan sebagai prinsip yang digunakan untuk mencapai tujuan atau keadaan yang diinginkan, yang ditandai dengan strategi-strategi yang diterapkan untuk mencapainya. Politik, pada dasarnya, adalah tentang pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, dalam konteks kebijaksanaan, politik dijelaskan sebagai proses yang memastikan terlaksananya suatu upaya atau pencapaian cita-cita yang diharapkan, serta mengatur cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.¹

Politik adalah suatu aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh

³ Firmanzah, *Mengelolah Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 66.

dan menjaga kekuasaan dalam suatu komunitas. Selain itu, politik juga dapat dijelaskan sebagai pertarungan untuk mengamankan dan menjaga sumber daya yang dianggap krusial. Dasar dari politik adalah suatu fenomena yang terkait dengan kehidupan manusia yang senantiasa berinteraksi dengan masyarakat. Politik merupakan manifestasi dari individu-individu dalam proses evolusinya yang tak pernah terelakkan.

Beberapa ahli telah mengemukakan pandangannya mengenai konsep politik. Deliar Noer, misalnya, menjelaskan bahwa politik mencakup semua tindakan atau sikap yang berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dengan tujuan mempengaruhi, mengubah, dan mempertahankan struktur sosial masyarakat. Miriam Budiardjo juga berpendapat bahwa politik bisa didefinisikan sebagai kegiatan dalam sistem politik (negara) yang berhubungan dengan proses perumusan tujuan sistem serta strategi untuk mencapainya. Pandangan kedua ahli ini menunjukkan bahwa politik tidak hanya berfokus pada kekuasaan semata, tetapi juga melibatkan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem sosial yang ada. Menurut Deutsch, politisasi merupakan fenomena di mana masalah-masalah di masyarakat menjadi masalah politik ketika pemerintah terlibat dalam pemecahannya atau ikut campur dalam penyelesaian masalah tersebut, sehingga hal ini dianggap sebagai aktivitas politik.¹

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik

adalah upaya masyarakat untuk memperoleh kekuasaan yang mereka kehendaki. Politik mencakup interaksi antarmanusia terkait dengan penguasaan, pengawasan, dan pengaruh. Dalam keseharian politik, individu-individu secara berkelanjutan berusaha mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Seiring waktu, politik menjadi elemen esensial dalam kehidupan manusia karena pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

B. Politik Uang dalam Pemilihan Umum

1. Politik Uang

Dalam bahasa Indonesia, politik uang didefinisikan sebagai tindakan memberi hadiah kepada pihak lain dengan tujuan tertentu. Pengertian hadiah dalam kamus bahasa Indonesia adalah pemberian secara sukarela dengan maksud tertentu¹ Politik uang dapat diartikan sebagai pertukaran uang dengan kebijakan atau keputusan yang dilakukan dalam politik dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya hal tersebut dilakukan atas kepentingan pribadi atau kelompok. Praktek politik uang merupakan strategi untuk memengaruhi individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat dengan memberikan imbalan materi. Hal ini sering kali melibatkan jual-beli suara dalam proses politik dan penggunaan dana secara pribadi

untuk memengaruhi preferensi pemilih.⁴

Uang dalam ranah politik kerap kali dipandang sebagai usaha untuk menggerakkan keputusan orang lain melalui pemberian imbalan tertentu. Sebagian menggambarkan uang dalam politik sebagai transaksi suara dalam proses politik atau persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Praktik serupa dapat ditemui dalam berbagai konteks, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum di tingkat nasional, serta dapat membawa dampak besar terhadap dinamika politik. Fenomena ini mempengaruhi keputusan-keputusan politik, strategi kampanye, serta hubungan kekuasaan antar pemimpin dan masyarakat, menciptakan berbagai dinamika dalam sistem politik.¹ Praktik politik uang adalah tindakan sengaja yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menawarkan atau memberikan uang atau kompensasi lainnya kepada orang lain dengan tujuan mempengaruhi penggunaan hak suara mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan mengarahkan pilihan mereka, menahan hak pilih mereka, atau menerima dan memberikan dana kampanye secara sengaja dari atau kepada pihak tertentu. Praktik ini mencakup berbagai bentuk transaksi dan kesepakatan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan demi keuntungan pihak yang memberikan kompensasi, sehingga mengancam integritas proses

⁴ Thadjoh Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung: PT Mizan Publika, 2015).

demokratis dan keadilan dalam pemilu.

Dengan demikian, politik uang dapat diartikan sebagai salah tindakan yang dilakukan dengan memberikan suap kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempergunakan hak pilihnya dalam memilih calon tersebut pada saat pemilihan berlangsung. Dengan cara yang calon tersebut lakukan, uang atau barang yang diberikan kepada warga bisa menjadi faktor simpati bagi mereka dalam menentukan suara mereka dalam setiap pemilihan umum. Dengan demikian, dengan melakukan klarifikasi terhadap pemilih, penting untuk mengidentifikasi target audiens yang rentan terpengaruh sehingga calon dapat berhasil dalam kampanyenya untuk memenangkan posisi tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Adapun bentuk-bentuk dari politik uang adalah sebagai berikut:

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Di dalam lingkungan masyarakat, termasuk di kalangan yang religius, uang diakui sebagai alat yang sangat penting dalam politik yang memiliki strategi tinggi untuk memperoleh kekuasaan. Hal ini di sebabkan uang pada dasarnya dianggap sebagai pasangan yang tidak terpisahkan dari kekuasaan. Uang memegang peranan penting dalam memperkuat citra seseorang dan juga dalam mengendalikan dialog strategis yang terkait dengan urusan politik dan kekuasaan. Dengan memiliki uang, individu memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam

memengaruhi pandangan masyarakat atau bahkan memaksakan kepentingan pribadi atau kelompoknya kepada orang lain melalui berbagai metode, termasuk penggunaan kekayaan finansial.¹

Dalam proses pemilihan umum, terdapat beberapa kegiatan yang mencakup praktik politik uang, seperti pemberian sumbangan kepada anggota partai, pendukung, atau kelompok tertentu baik dalam bentuk materi maupun finansial. Dalam proses pemilihan, sering kali terjadi penggunaan bantuan langsung (dikenal sebagai Sembako politik) oleh sejumlah calon kepada komunitas atau kelompok tertentu. Cara yang umum dilakukan adalah dengan mengajukan proposal yang menjelaskan jenis dan jumlah bantuan yang diminta, atau bahkan bantuan yang akan didistribusikan. Jika proposal tersebut disetujui, maka diharapkan bahwa para pemilih yang menerima bantuan tersebut akan memberikan dukungan dalam bentuk suara mereka pada calon tersebut. Sebagai contoh konkret dari sembako politik yang dimaksud dapat mencakup beras, minyak goreng, mie instan, telur, gula, dan komoditas sembako lainnya. Pendistribusian bantuan semacam ini umumnya terbukti efisien karena ditujukan langsung kepada individu atau kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah.¹

b. Berbentuk Fasilitas Umum

Upaya politik pencitraan yang dilakukan oleh kandidat-

kandidat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat di wilayah pemilihannya tidak hanya memberikan manfaat secara pribadi bagi mereka, tetapi juga memberikan dampak positif pada fasilitas dan infrastruktur umum. Beberapa contoh dari upaya politik ini meliputi pembangunan jalan dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, yang seringkali dijadikan sebagai bentuk kontribusi politik untuk mendapatkan dukungan.

Dalam penelitian ini, praktik politik uang umumnya melibatkan pemberian dana dalam jumlah tertentu, serta pemberian barang-barang seperti paket sembako dan proyek pembangunan.

3. Strategi Politik Uang

Beberapa hal yang menjadi strategi-strategi dari politik uang adalah :

a. Serangan Fajar

Serangan fajar merujuk pada praktik suap politik yang bertujuan untuk memperoleh dukungan pemilih, umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu untuk memenangkan calon tertentu dalam kontes politik. Biasanya, praktik ini ditargetkan kepada segmen masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terutama menjelang pemilihan umum. Pembagian berupa uang ataupun dalam bentuk sembako kepada masyarakat juga merupakan salah satu bentuk dari politik uang itu sendiri. Serangan fajar yang sering dilakukan oleh

calon pemimpin sering kali dianggap biasa oleh masyarakat. Serangan fajar mengacu pada praktik politik yang melibatkan pembelian suara, biasanya dilakukan oleh sekelompok individu untuk mendukung calon tertentu dalam perebutan jabatan kepemimpinan.⁵ Strategi pemberian serangan fajar kepada masyarakat biasanya akan dilakukan oleh para calon pada saat masa-masa kampanye berlangsung menjelang pemilu dilaksanakan.

Menurut Haryanto, serangan fajar merupakan upaya para calon pemimpin untuk memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan memenangkan dukungan dan suara rakyat. Dengan demikian, serangan fajar adalah praktik umum di mana calon pemimpin memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan suara.

b. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa seringkali terjadi saat periode kampanye, di mana partai politik menggalang dukungan dengan menawarkan imbalan finansial kepada peserta untuk mendukung acara kampanye mereka. Dukungan keuangan ini umumnya mencakup biaya transportasi, penggantian biaya waktu dan energi, dan biaya makan, dengan harapan bahwa peserta yang dijanjikan imbalan tersebut akan

⁵ Herman dkk, "Pragmatisme dan Politik Pemilu" *Jurnal Mentari Publika*, Vol. 02 No.2 2022,98

memberikan dukungan politik pada partai tersebut di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, dengan adanya dua pendekatan dalam penerapan politik uang, baik melalui aksi-aksi seperti serangan fajar atau pengorganisasian massa yang dilakukan oleh staf kampanye, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau pemilih sehingga mereka akan memberikan suara mereka sebelum, selama, atau bahkan menjelang pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Mobilisasi massa ini erat hubungannya dengan politik praktis yang membahas bagaimana negara dijalankan dalam sistem pemerintahan serta segala aktivitas yang terkait dengan kebijakan umum, baik di lapangan maupun dalam kehidupan berbangsa. Verba, Schlozman, dan Brady mengamati bahwa mobilisasi massa muncul dalam tiga fenomena sosial, yakni dalam konteks ekonomi sosial seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran; dalam upaya pemulihan yang dijalankan oleh pemerintah totaliter; serta dalam cara yang selektif untuk mengikutsertakan warga dalam ranah politik.¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mobilisasi massa ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk dengan memotivasi satu atau sekelompok orang untuk bagaimana mereka dalam meningkatkan kesadaran terhadap tujuan pembangunan yang biasa

dapat dilakukan dengan sharing bersama.

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

Beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya politik uang, dapat diidentifikasi dari perspektif masyarakat¹ seperti:

a) Kemiskinan

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap praktik money politik adalah tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan yang signifikan ini mencerminkan kondisi di mana individu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Faktor ini sering kali dipicu oleh tingkat pengangguran yang tinggi dan pekerjaan yang memberikan upah rendah. Individu yang menghadapi pengangguran atau yang hanya mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan rendah dan tidak stabil akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, ketidakadilan sosial dan ekonomi juga dapat menjadi pemicu kemiskinan. Kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, dan layanan publik sering kali berisiko mengalami kemiskinan. Dalam konteks ini, praktik *money politik* menjadi semacam solusi bagi sebagian masyarakat untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Mereka mungkin

menerima uang tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, karena yang terpenting bagi mereka adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Supriatma, kemiskinan adalah kondisi serba terbatas yang terjadi bukan karena keinginan atau kesalahan individu yang mengalami kemiskinan tersebut. Akibatnya, mereka sering kali bergantung pada bantuan dari luar, terutama saat pelaksanaan pemilu, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, Kotze menambahkan bahwa meskipun masyarakat miskin memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengakses sumber daya, mereka tetap sangat bergantung pada dukungan eksternal untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kombinasi dari kedua pandangan ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah individual, tetapi juga struktural yang memerlukan intervensi berkelanjutan dari luar.¹ Kemiskinan dapat disimpulkan sebagai situasi di mana individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup yang berarti bagi mereka. Keadaan ini mencakup ketidakmampuan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya penting seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan

kesehatan, yang semuanya sangat penting untuk mencapai kehidupan yang layak dan produktif. Dengan kata lain, kemiskinan tidak hanya mengacu pada kekurangan materi, tetapi juga pada keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan yang menghalangi seseorang atau kelompok untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka.

b) Rendahnya Pengetahuan Masyarakat tentang Politik

Sebagian masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep politik, termasuk bentuknya dan implikasinya. Kurangnya pendidikan politik di sekolah maupun di lingkungan sosial mereka mungkin menjadi penyebabnya. Fenomena ini dapat memicu praktik politik uang, di mana masyarakat yang kurang peduli terhadap proses pemilihan umum cenderung menerima imbalan dari calon pemilihan. Bagi mereka, politik uang mungkin dianggap sebagai hal yang lumrah dan tidak mengganggu. Mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari implikasi jangka panjang dari tindakan mereka, termasuk risiko adanya permintaan pengembalian imbalan yang mungkin diajukan oleh kandidat yang telah terpilih. Selain itu, mereka juga mungkin kurang peka terhadap kenyataan bahwa tindakan tersebut pada akhirnya dapat merugikan diri mereka sendiri secara signifikan di masa depan. Kesadaran akan

konsekuensi jangka panjang ini sering kali terabaikan, padahal dampaknya bisa jauh lebih besar dan merugikan daripada yang diperkirakan sebelumnya. Sebagai hasilnya, mereka mungkin terjebak dalam situasi di mana mereka harus menghadapi akibat yang tidak diinginkan dan berpotensi merugikan secara substansial.

Pendidikan politik merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem politik, mekanisme pemilihan umum, serta signifikansi partisipasi politik. Upaya ini memiliki dampak besar, karena memastikan bahwa pemilih memahami dengan baik tentang calon yang mereka pilih serta implikasi keputusan politik yang mereka buat terhadap negara dan komunitas. Pendidikan politik tidak hanya mengedukasi individu tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, tetapi juga membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab.⁶ Oleh karena itu, pendidikan politik memainkan peran krusial dalam menciptakan pemilih yang lebih sadar, terinformasi, dan aktif dalam proses demokrasi.

Pendidikan politik yang diterapkan baik di sekolah maupun

⁶ Ospensius Kawawa Taranau, "Pentingnya Pendidikan Politik Dalam Pemilihan Umum," *Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024), 4-5.

di lingkungan masyarakat memegang peranan krusial karena menjadi salah satu metode utama untuk membantu individu memahami pentingnya politik dan bagaimana cara menerima serta berpartisipasi dalam politik secara positif. Secara umum, pendidikan politik dapat dipahami sebagai proses pemindahan budaya politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya politik sendiri meliputi nilai-nilai, keyakinan empiris, dan simbol ekspresif yang mempengaruhi dinamika dalam aktivitas politik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik sebagai bagian dari upaya penyebaran budaya politik agar kesadaran politik, yang merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, dapat lebih berkembang dan mendalam.¹

Menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik adalah tindakan masyarakat untuk memberikan suaranya kepada calon pemimpin yang dianggapnya kompeten. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sosialisasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal atau mengetahui bagaimana politik itu dan bagaimana kesadaran untuk melihat faktor yang akan ditimbulkan dari politik itu, seperti yang sering dilakukan oleh kebanyakan para calon dalam memberikan uang atau barang kepada masyarakat.¹

Dengan demikian, adanya sosialisai yang dilakukan baik itu di lembaga pendidikan maupun dalam masyarakat maka sangat

membantuh bagi para pemilih pemula untuk mengetahui pentingnya kesadaran akan politik itu dan bagaimana mereka dalam mengantisipasi dampak yang akan di berikan oleh politik itu sendiri.

4. Konsep Politik Uang dan Pemilihan Umum

Menurut Ismawan, politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan memilih calon yang memberikan imbalan. Praktik politik uang mencakup berbagai langkah seperti memberikan dana, barang, atau layanan kepada warga untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan.

Politik uang, pada dasarnya, merupakan praktik menarik yang bertujuan memengaruhi orang lain, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Dalam konteks ini, calon seringkali memberikan imbalan berupa uang atau barang untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Praktik ini telah menjadi hal lumrah dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, sesuai dengan pandangan Weber tentang teori tindakan sosial atau rasionalitas. Menurut teori ini, para pemilih dalam pemilihan kepala desa menggunakan pertimbangan pribadi mereka, termasuk imbalan yang diterima dari calon, untuk menentukan pilihan mereka. Oleh karena itu, calon umumnya bersaing untuk memberikan imbalan yang lebih besar guna mendapatkan dukungan dan suara yang lebih banyak dari pemilih.¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep politik tersebut dapat mendorong para calon untuk memenangkan pemilu dengan memberikan barang atau uang kepada para pemilih. Para calon akan berupaya menarik perhatian pemilih dengan memberikan imbalan yang tinggi. Dengan imbalan tersebut, pemilih akan mempertimbangkan calon yang akan dipilih sebagai pemimpin.

C. Kepala Desa

Kepemimpinan telah ada sejak awal peradaban manusia, muncul bersamaan dengan kebutuhan untuk bekerja sama dan bertahan hidup dalam komunitas. Sejak saat itu, kerjasama di antara manusia mengarah pada pembentukan struktur kepemimpinan. Aspek utama dari kepemimpinan adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin berperan sebagai pengarah dan bawahan sebagai penerima arahan. Dalam konteks pemerintahan, pemerintah adalah pihak yang memimpin, sementara rakyatnya adalah yang dipimpin, dengan negara sebagai objek materinya. Di tingkat desa, kepala desa memiliki peran penting dalam memotivasi dan mendorong masyarakatnya, bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama dalam kerangka organisasi pemerintahan desa yang menjadi basis pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan.

Kepala desa merupakan posisi kunci dalam struktur pemerintahan desa, bertugas memimpin dan mengelola administrasi desa serta berperan

sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan lokal. Berdasarkan pendapat para ahli, pengertian kepala desa dapat berbeda-beda. Menurut Tahmit, kepala desa adalah pemimpin utama di tingkat desa di Indonesia, yang memimpin pemerintah desa dengan masa jabatan selama enam tahun, yang dapat diperpanjang untuk satu periode tambahan. Dalam pandangan Talizidhuhu Ndhara, kepala desa bukan hanya seorang pemimpin formal yang diangkat oleh pemerintah, tetapi juga bertanggung jawab terhadap segala aspek kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan desa. Tugas utama kepala desa meliputi pengelolaan berbagai urusan administratif dan sosial yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Sebagai seorang pemimpin, kepala desa memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat desa, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan lokal dan arahan dari pemerintah pusat.

Kepala desa adalah pemimpin utama dalam sebuah wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk sesuai dengan aturan masyarakat setempat. Ia memegang peran penting sebagai pimpinan di tingkat organisasi masyarakat yang berada di bawah camat, berfungsi untuk mengelola dan mengatur berbagai kepentingan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan memastikan kebutuhan serta hak-hak masyarakat terpenuhi dengan baik.

Tanggung jawabnya mencakup pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Perwakilan Desa, yang kemudian diteruskan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

1. Fungsi dan Jabatan Kepala Desa

Ada beberapa fungsi dan jabatan dari kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan aktivitas untuk mengatur urusan domestik di lingkungan desa sendiri.
- b. Mendorong keterlibatan warga dalam lingkup komunitas desa.
- c. Melakukan kewajiban untuk memelihara kedamaian dan keteraturan di tengah masyarakat desa.⁷

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa, fungsi pemerintah desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, implementasi pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.¹ Apabila pemimpin mampu dalam menjalankan fungsinya, maka dengan mudah sebuah organisasi akan mencapai sasarannya.

Dengan demikian, jika beberapa hal diatas dapat dilaksanakan dengan baik oleh kepala desa maka akan dapat membantu dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya dan juga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama dalam masyarakat.

⁷ Dewit Putriansyah, "Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Teberau Panjang, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi" (n.d.): 129.

2. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

¹ Di dalam suatu badan pemerintahan, prinsip-prinsip hak serta kewajiban yang melekat pada seorang pemimpin menjadi acuan bagi mereka dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Sebagai kepala desa, terdapat berbagai aspek yang dianggap sebagai hak serta kewajiban yang wajib dijalankan, di antaranya:

- a. Menjadi pengemban tugas dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa,
- b. Mengembangkan serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat desa,
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah desa,
- d. Memelihara kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat desa,
- e. Memediasi konflik antara warga desa,
- f. Menginisiasi serta menyetujui peraturan-peraturan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan
- g. Melestarikan adat dan tradisi yang ada dan berkembang di desa tersebut

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala desa dibantu oleh staf desa yang meliputi sekretaris desa serta anggota perangkat desa lainnya. Oleh karena itu, kepala desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan untuk desa dimana dia

ditempatkan untuk menjadi pemimpin. Selain itu, hak seorang kepala desa adalah bagaimana mengajukan rancangan serta menetapkan peraturan desa. Seorang pemimpin akan dapat memberikan dorongan yang baik dalam masyarakat atau dapat memberikan pengaruh bagi bawahannya.

E. Peran Kepala Desa

¹Menurut Veithzal Rivai, peran merupakan sebuah konsep yang mencerminkan harapan dan aspirasi untuk menciptakan perubahan yang berarti serta mendorong kemajuan. Peran ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan yang ada, namun tetap berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan seorang pemimpin dalam meningkatkan kinerja mereka. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana seorang pemimpin mampu menjalankan tugas yang diberikan dan seberapa efektif mereka dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, kinerja seorang pemimpin diukur dari kemampuannya untuk memenuhi ekspektasi dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan organisasi. Setiap individu dalam posisi kepemimpinan harus memahami bahwa pekerjaan mereka bukan hanya sekadar pelaksanaan tugas, tetapi juga mencerminkan harapan dan tanggung jawab yang diemban. Oleh karena itu, peran dalam sebuah organisasi tidak hanya berkisar pada melaksanakan pekerjaan dengan baik, tetapi juga bagaimana peran tersebut dapat

memenuhi harapan dan mendorong pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adapun peran yang dimiliki oleh kepala desa dalam desa adalah sebagai berikut

1. Motivasi adalah sebuah kekuatan pendorong atau pengaruh yang diberikan oleh seseorang kepada individu lain, bertujuan agar orang tersebut dapat melaksanakan apa yang telah dimotivasi dengan cara yang kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, motivasi berfungsi sebagai rangsangan yang merangsang dan mempengaruhi individu untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan tujuan dan harapan yang diinginkan. Dengan adanya motivasi yang efektif, individu yang menerima dorongan tersebut akan memiliki dorongan internal untuk menjalankan tugas atau mencapai target dengan sikap yang penuh kesadaran dan pertimbangan yang matang, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
2. Fasilitator adalah bentuk dukungan yang dirancang untuk memperlancar komunikasi di antara sekelompok individu, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah. Dengan bantuan fasilitator, proses interaksi kelompok menjadi lebih terarah dan terorganisir, memungkinkan anggota kelompok untuk saling memahami pandangan masing-masing dan berkolaborasi dalam mencari solusi. Fasilitator membantu

memfasilitasi diskusi, menyusun agenda, serta memastikan bahwa semua suara terdengar dan dipertimbangkan, yang pada akhirnya mempermudah pencapaian kesepakatan bersama dan solusi yang konstruktif. Dukungan ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan hasil kerja kelompok.

3. Mobilisator adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menggerakkan orang lain agar terlibat dalam berbagai kegiatan atau proyek pembangunan yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Mereka memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan usaha-usaha kolektif, menginspirasi tindakan, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bekerja sama menuju tujuan bersama. Dengan kepemimpinan yang efektif, mobilisator dapat menyatukan berbagai sumber daya dan energi, serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam usaha pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan. Keahlian mereka dalam komunikasi dan persuasif sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dan sukses dalam setiap inisiatif pembangunan.
4. Penguatan kelembagaan. Dalam penguatan kelembagaan ini, kepala desa membangun kelembagaan yang kuat dan prosedur yang jelas sehingga dapat mengatasi masalah terkait dengan tindakan politik uang, termasuk sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar

Oleh sebab itu, karena adanya peran aktif dari kepala desa khususnya dalam menyikapi praktek politik uang maka masyarakat pun akan memahami tentang politik uang dan bagaimana menanggapi pelaksanaan praktek politik uang tersebut. Dengan kesadaran yang di miliki tersebut masyarakat akan semakin menaikkan partisipasi politik dalam kerangka kesadaran dalam bermasyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih berkarya untuk kepentingan bersama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin merupakan individu yang memiliki berbagai kelebihan dan predisposisi khusus yang memungkinkan mereka untuk membawa perubahan dan memberikan arahan serta bimbingan kepada bawahannya. Peran seorang pemimpin, terutama dalam konteks kepala desa, melibatkan perilaku yang diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dan memenuhi harapan yang berkaitan dengan kemajuan komunitas. Meskipun secara teori peran ini bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, penting untuk diingat bahwa pemimpin juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya, sehingga mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat secara efektif.

